



NOTA KEUANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2021



**NOTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Umum

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Melalui pengelolaan keuangan yang baik diharapkan akan mampu memberikan akselerasi bagi terwujudnya hakikat pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Sebagai salah satu instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara terminologi APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021, pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sistem pengelolaan keuangan yang baik merupakan kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal

merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dalam penyusunan anggaran, hal tersebut diharapkan mampu menghindarkan dari situasi *underfinancing* maupun *overfinancing*, sehingga akan menjamin efisiensi dan efektifitas penganggaran.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Penyusunan penganggaran daerah tahun anggaran 2021, diwarnai masih pada situasi pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan Kejadian Luar Biasa yang membutuhkan respon kebijakan dan upaya penanganan yang luar biasa untuk memitigasi dampak terhadap aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap skenario pembangunan baik yang menyangkut substansi maupun sumberdaya yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan tahun 2021.

Gerak roda perekonomian di Indonesia melambat dengan adanya Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Risiko ketidakpastian yang tinggi masih terlihat di tahun 2020 dan tahun 2021. Meskipun demikian, proyeksi menunjukkan adanya perbaikan ekonomi di tahun 2021. Langkah-langkah kebijakan telah dilakukan Pemerintah untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional. Dukungan stimulus yang masif dikeluarkan oleh Pemerintah menjadi salah satu faktor yang mendukung perbaikan ekonomi. Oleh karena itu, tahun 2021 menjadi masa yang penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak Pandemi Covid-19, sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 yang merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa satu tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021. Selain berpedoman pada dokumen tersebut diatas, penyusunan APBD juga

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun yang memberikan arahan atau petunjuk kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan mensinkronisasikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Provinsi termasuk dinamika yang berkembang di tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2021 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2021, selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah APBD Tahun Anggaran 2021. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. RKP Tahun 2021 mengusung tema **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** dengan fokus pembangunan diarahkan pada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Dalam rangka untuk mencapai sasaran pembangunan nasional pemerintah menetapkan lima prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi; dan
5. Transformasi ekonomi.

Sedangkan tema pembangunan provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yaitu **“Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”**, untuk prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah fokus pada akses pengurangan beban pengeluaran kebutuhan dasar, peningkatan sektor unggulan daerah serta kondisivitas wilayah.

Sedangkan untuk prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
3. Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing.
4. Penguatan ketahanan bencana.
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Dengan mempertimbangkan tema pembangunan nasional dan provinsi tersebut, tema pembangunan daerah Kota Magelang pada Tahun 2021 adalah **“Kompetitif bersama Mitra”**. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya eksekusi kemitraan sebagai landasan dalam memantapkan pembangunan secara menyeluruh yang mengindikasikan Kota Magelang

sebagai kota jasa yang modern dan cerdas di landasi masyarakat yang sejahtera dan religius.

Prioritas pembangunan daerah Kota Magelang berpedoman pada tema pembangunan tahun 2021 dalam rangka pencapaian Visi Walikota difokuskan pada:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan secara berkelanjutan.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana.
5. Peningkatan ketahanan pangan.

Sedangkan arah kebijakan daerah direncanakan disesuaikan dengan upaya penanggulangan dan penanganan dampak covid 19 serta difokuskan pada peningkatan kinerja sektor-sektor strategis dan produktif, sebagai upaya pemulihan ekonomi yaitu:

1. Menggerakkan Kembali industri pariwisata, dan investasi dengan memberikan dukungan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dari sisi ketenagakerjaan, utilitas, keringanan retribusi, relaksasi pinjaman, melakukan promosi kembali baik di dalam maupun luar negeri dan hingga menyiapkan insentif untuk industry pariwisata sekaligus pelaku ekonomi kreatif;
2. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha lainnya yang terkait dengan kebijakan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja kembali sehingga dapat meningkatkan

Untuk prioritas urusan yang mendukung arah kebijakan pembangunan Kota Magelang tahun 2021 untuk urusan pemerintahan wajib yang terdiri dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar disamping juga terdapat urusan pilihan.

Sedangkan program unggulan sebagai prioritas pada tahun 2020 adalah:

1. Program peningkatan daya saing daerah;
2. Program pemerintahan responsif dan partisipatif;
3. Program masyarakat religius menuju masyarakat madani;
4. Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;

5. Program penguatan pertumbuhan ekonomi;
6. Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
7. Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
8. Program peningkatan kualitas sumber daya pemerintah;
9. Program kota cerdas

1.2. Maksud dan Tujuan

Nota Keuangan ini disusun untuk memberikan penjelasan dan keterangan mengenai gambaran kondisi umum keuangan serta memberikan penjelasan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Daerah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 yang merupakan sumber data dan informasi baik dari Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah maupun Anggaran Pembiayaan Daerah. Adapun maksud dan tujuan penyusunan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 ini adalah sebagai dasar rencana tahunan keuangan daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD serta dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021.

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);

27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun Nomor 55);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
36. Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Nota Keuangan APBD Kota Magelang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
- III. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah
- IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah
- V. Program dan Kegiatan
- VI. Penutup

BAB II

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di era otonomi daerah telah menyebabkan perubahan mendasar perihal pengaturan hubungan pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah antara lain:

1. Peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan sosial budaya masyarakat.
4. Peningkatan demokratisasi.

Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kesempatan yang besar untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan prioritas daerah yang lebih luas. Akan tetapi hal tersebut membutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan daerah tidak bisa lagi menggantungkan diri sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Sehingga pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disertai dengan pelimpahan pengelolaan keuangan. Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (*revenue*), maupun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakat.

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi pemerintah daerah dalam rangka membiayai program dan kegiatan baik yang ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Sehingga posisi pendapatan daerah menjadi komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD guna meningkatkan kapasitas fiskal dalam pemberian pelayanan kepada publik. Mengingat bahwa desentralisasi kewenangan

kepada daerah telah memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri, maka pemerintah daerah dituntut harus kreatif agar pengelolaan di daerahnya dapat lebih fokus untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Salah satu hal yang mutlak dilakukan adalah kreativitas pemerintah daerah dalam mencari sumber pendapatan yang ada di wilayahnya.

Di lihat dari struktur pendapatan, alokasi pendapatan dari pemerintah pusat yang memberikan kontribusi cukup besar dibandingkan dengan pendapatan daerah dari PAD. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Magelang selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja gaji pegawai. Dari kondisi tersebut maka kinerja pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan dalam rangka meningkatkan penerimaan, khususnya pendapatan yang berasal dari PAD.

Perkembangannya sampai dengan saat ini, pajak dan retribusi masih menjadi andalan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi upaya peningkatan PAD hingga saat ini proporsinya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan struktur belanja. Namun demikian dilihat dari kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD selalu meningkat tiap tahun, hal ini didukung dengan tingkat efektivitas dari penerimaan daerah secara keseluruhan. Ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah, target pada tahun anggaran 2021 diperkirakan akan meningkat, akan tetapi porsi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber dari Pendapatan Transfer. Untuk itu perlu upaya guna mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Magelang selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan daerah yang ada.

Pemerintah Daerah harus mempersiapkan kebijakan fiskal dalam menghadapi tahun 2021 dengan risiko ketidakpastian yang masih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan di tahun 2021 masih akan diarahkan untuk mempercepat program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan termasuk juga kebijakan pendapatan daerah.

Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Daerah dalam tahun anggaran 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Perkembangan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2018 – 2020
(Dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2018	ANGGARAN TAHUN 2019	ANGGARAN TAHUN 2020
1	PAD	225.916.332	242.404.296	255.038.220
	a. Pajak daerah	30.646.800	35.000.000	36.159.000
	b. Retribusi Daerah	4.909.300	5.290.535	5.350.129
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.693.811	9.982.607	9.982.607
	d. Lain-lain PAD yang Sah	181.666.421	192.131.154	203.546.484
2	Dana Perimbangan	583.609.549	590.611.504	563.537.121
	a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	30.321.942	24.733.997	23.861.159
	b. DAU	440.041.244	455.177.029	460.404.050
	c. DAK	113.246.363	110.700.478	79.271.912
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	93.150.056	125.577.123	101.532.013
	a. Pendapatan Hibah	18.268.200	18.672.000	16.324.000
	b. Dana Darurat			
	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	52.555.256	55.273.984	40.043.975
	d. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	18.250.000	42.396.139	45.164.038
	e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	4.076.600	9.235.000	0
	Jumlah	902.675.937	958.592.923	920.107.354

Perkembangan anggaran pendapatan daerah dalam tiga tahun terakhir, yaitu Rp.902.675.937.000,00 pada tahun 2018, naik menjadi Rp.958.592.923.000,00 pada tahun 2019, namun kemudian turun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.920.107.354.000,00. Adapun Pendapatan Daerah di Kota Magelang terdiri dari komponen pendapatan-pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari Rp.225.916.332.000,00 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp.242.404.296.000,00, kemudian naik lagi pada tahun 2020 menjadi Rp.255.038.220.000,00.

2. Dana Perimbangan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari Rp.583.609.549.000,00 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp.590.611.504.000,00, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi Rp.563.537.121.000,00.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari Rp.93.150.056.000,00 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp.125.577.123.000,00, namun pada tahun 2020 turun menjadi Rp.101.532.013.000,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan struktur pendapatan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan kelompok dan jenis belanja sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- b. Pendapatan Transfer Antar daerah

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Pendapatan Hibah
- b. Dana Darurat
- c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.2 Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah sehingga diharapkan mampu mendukung kemandirian daerah dalam menyumbang komponen Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial tersebut harus digali semaksimal mungkin dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Secara umum permasalahan utama pendapatan daerah Kota Magelang adalah:

1. Sebagian Wajib Pajak belum memasukkan tarif pajak sebesar 10% untuk jasa usaha restoran dalam pembayaran pajak restoran oleh konsumen.
2. Belum ada desk penerimaan dana transfer untuk menentukan/mengetahui besaran dana transfer yang sesuai dan seharusnya diterima oleh daerah.
3. Sebagian Wajib Pajak belum membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan atau sesuai omzet (ability to pay rendah).
4. Beberapa jenis retribusi daerah dihilangkan untuk tidak dipungut.

2.3. Estimasi Pendapatan Daerah

Mempertimbangkan kondisi perekonomian di Kota Magelang, dengan asumsi pemulihan ekonomi paska Covid-19 dan beberapa kebijakan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kota Magelang menargetkan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 direncanakan dapat dilihat dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021
(Dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2020
1	Pendapatan Asli Daerah	212.850.446
	1. Pajak daerah	32.597.000
	2. Retribusi Daerah	4.913.993
	3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.214.013
	4. Lain - lain PAD yang Sah	165.125.440
2	Pendapatan Transfer	482.564.356
	1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	442.580.313
	2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.984.043
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.171.200
	1. Pendapan Hibah	16.171.200
	2. Dana Darurat	
	3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
	Jumlah	711.586.002

Anggaran pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.711.586.002.000,00 yang terdiri dari PAD sebesar Rp.212.850.446.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp.482.564.356.000,00 dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.16.171.200.000,00.

2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 ini disusun dengan mengacu pada regulasi yang ada dan secara rasional memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah.

Penentuan target pendapatan, Pemerintah Kota Magelang tetap memperhatikan faktor-faktor *non-distorsi* terhadap perekonomian, yaitu hal-hal yang ditimbulkan adanya implikasi pajak atau pungutan yang bisa menimbulkan pengaruh tidak baik terhadap perekonomian. Selain dana transfer dari pusat, pajak daerah merupakan pendapatan yang menjadi andalan penerimaan pemerintah Kota Magelang. Dalam konteks ini fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) fungsi. Pertama, fungsi *budgeter* yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara

yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kedua, fungsi *regulator* yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat pengatur untuk mencapai tujuan.

Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan penggalan potensi dan penetapan obyek-obyek pajak baru juga selalu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Penggalan potensi dan penetapan obyek-obyek pajak dan retribusi baru perlu mempertimbangkan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat yang pada gilirannya dapat mendistorsi kegiatan perekonomian di Kota Magelang. Inisiatif penciptaan suatu jenis pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga perlu mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah. Hal ini dilandasi pemahaman bahwa pajak daerah yang baik akan mendorong peningkatan pelayanan publik yang akan meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Magelang.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam pencapaian target pendapatan yang direncanakan pada Tahun anggaran 2021 dengan melakukan kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan daerah tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/pemerintah daerah dalam rangka bagi hasil.
2. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut.
3. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Magelang serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021.

4. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
5. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer mengacu pada alokasi transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat. Mengingat alokasi definitif dana transfer belum diperoleh, maka kebijakan alokasi pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan rata-rata realisasi penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir.
 - b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020 setelah penyesuaian akibat covid-19.
 - c. Alokasi Dana transfer Khusus belum dianggarkan.Selanjutnya akan disesuaikan setelah Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 disahkan atau alokasi dana transfer telah dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
6. Pendapatan bagi hasil yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021. Dalam hal penetapan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.
7. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan.

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah

APBD pada prinsipnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran guna mendukung pencapaian visi dan misi dan tujuan pembangunan daerah melalui program dan kegiatan. APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikator yang ingin dicapai yang dijabarkan dalam belanja daerah. Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Setiap dana untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus berdasarkan pada output atau hasil yang terukur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran yaitu: yang pertama prinsip *kemandirian* yang selalu

mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, yang kedua prinsip *prioritas* bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, dan yang ketiga prinsip *efisiensi dan efektifitas* anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui perkembangan Belanja Daerah Kota Magelang dalam tahun anggaran 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Perkembangan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 - 2020
(Dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Belanja Tidak Langsung	334.211.329	332.577.333	350.807.934
	a. Belanja Pegawai	309.053.765	314.920.128	318.379.205
	b. Belanja Bunga			
	c. Belanja Subsidi			
	d. Belanja Hibah	10.886.043	11.817.352	25.938.141
	e. Belanja Bantuan Sosial	7.747.878	4.162.290	2.554.364
	f. Belanja Bagi Hasil kpd Pemerintah Desa/Kelurahan			
	g. Belanja Bantuan Keuuangan	660.703	563.205	-
	h. Belanja Tidak Terduga	5.862.940	1.114.358	3.936.224
2	Belanja Langsung	732.172.598	760.424.390	644.799.420
	a. Belanja Pegawai	60.494.202	64.882.184	61.180.552
	b. Belanja Barang dan Jasa	389.699.570	404.810.387	413.539.818
	c. Belanja Modal	281.978.826	290.731.819	170.079.050
	Jumlah	1.066.383.927	1.093.001.723	995.607.354

Perkembangan anggaran Belanja Daerah dalam tiga tahun terakhir, yaitu Rp.1.066.383.927.000,00 pada tahun 2018 naik menjadi sebesar Rp.1.093.001.723.000,00 pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.995.607.354.000,00. Adapun Belanja Daerah tersebut terdiri dari dua komponen belanja sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 mengalami penurunan dari Rp.334.211.329.000,00 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 332.577.333.000,00. Kemudian pada tahun 2020 naik menjadi Rp.350.807.934.000,00.
2. Belanja Langsung pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari Rp.732.172.598.000,00 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp.760.424.390.000,00. Kemudian pada tahun 2020 turun menjadi Rp.644.799.420.000,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, belanja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan kelompok dan jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi di digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, yang terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja modal tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja modal bangunan dan gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Keterbatasan ruang fiskal membuat pembiayaan pembangunan di Kota Magelang masih bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat yang disebabkan oleh tingginya proporsi belanja yang dialokasikan untuk belanja wajib. Oleh karena itu masih perlu dilakukan langkah langkah terobosan terkait optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja daerah untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal serta memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar pemerintah dapat melakukan intervensi dalam menghadapi tantangan pembangunan. Terkait dengan penyerapan anggaran yang belum optimal, pemerintah Kota Magelang sudah mulai menunjukkan kinerja yang baik, namun tetap terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang terintegrasi mulai dari pengalokasian hingga penyerapan anggaran belanja tidak menumpuk di akhir tahun. Dari waktu ke waktu permasalahan utama Belanja Daerah Kota Magelang secara umum adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi program kegiatan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang muncul setelah penetapan APBD.
2. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan indikator yang terukur untuk penilaian kinerja program kegiatan.
3. Belum optimalnya pemahaman pengelola keuangan Perangkat Daerah, untuk semua unsur perangkat daerah terkait dengan regulasi baru tentang peraturan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

4. Belum ada update Analisa Standar Belanja (ASB) terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah yang baru dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang tahun 2020 masih tetap diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas.

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung per-tumbuhan ekonomi Kota Magelang dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja.

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) OPD.

4. Optimalisasi Belanja Langsung.

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel.

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, belanja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan kelompok dan jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan untuk pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021.

- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 6) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkada setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

8) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian Insentif pajak daerah dan retribusi daerah diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 2) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020.
- 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diberikan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milih pemerintah daerah untuk pelaksanaan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- 4) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- 5) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan dalam rangka pemberian bantuan berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut:

- a. Alokasi belanja modal pada kegiatan diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).
- c. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- d. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- e. Penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- f. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

- g. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- h. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan beberapa kebijakan diatas, Pemerintah Kota Magelang merencanakan Belanja Daerah pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Rencana Belanja Daerah Tahun 2021
(Dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2021
1	Belanja Operasi	657.975.734
	1. Belanja Pegawai	332.536.971
	2. Belanja Barang dan Jasa	317.078.139
	3. Belanja Bunga	-
	4. Belanja Subsidi	-
	5. Belanja Hibah	7.273.332
	6. Belanja Bantuan Sosial	1.087.292
2	Belanja Modal	99.305.201
	1. Belanja Modal Tanah	22.700.000
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.573.978
	3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung	44.909.191
	4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	16.122.032
	5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-
	6. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-
3	Belanja Tidak Terduga	11.000.000
	1. Belanja Tidak Terduga	11.000.000
4	Belanja Transfer	-
	1. Belanja Bagi Hasil	-
	2. Belanja Bantuan Keuangan	-
	Jumlah	768.280.935

Anggaran Belanja Daerah pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.768.280.935.000,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.657.975.734.000,00, belanja modal sebesar Rp.99.305.201.000,00 dan belanja tidak terduga sebesar Rp.11.000.000.000,00.

3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 harus berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, serta harus memperhatikan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021. Adapun Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 secara rinci dirumuskan sebagaimana tertuang dalam lampiran I:

BAB IV

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Kondisi Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Apabila APBD diperkirakan surplus diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Sementara itu, jika APBD diperkirakan defisit maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berkenaan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Namun apabila dalam penyusunan APBD terdapat Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan, maka Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran berkenaan bersaldo nol. Dalam hal perhitungan penyusunan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Untuk mengetahui perkembangan Pembiayaan Daerah dalam tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Perkembangan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2018 – 2020
(Dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 2018	Tahun2019	Tahun2020
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	184.770.764	134.408.800	86.000.000
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	180.992.764	134.408.800	86.000.000
	b. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-
	e. Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	f. Penerimaan Dana Bergulir	50.000	-	-
	g. Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.062.774	-	10.500.000
	a. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	b. Penyertaan Modal(Investasi) Pemerintah Daerah	21.062.774	-	10.500.000
	c. Pembayaran Pokok Hutang			
	d. Pemberian Pinjaman Daerah			
	e. Pemberian Dana Bergulir			
	Pembiayaan Netto	163.707.990	134.408.800	75.500.000

Perkembangan Pembiayaan Netto dalam tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp.163.707.990.000,00 turun menjadi sebesar Rp.134.408.800.000,00 pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.75.500.000.000,00. Pembiayaan tersebut terdiri dari dua komponen pembiayaan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2018 sebesar Rp.184.770.764.000,00, pada tahun 2019 sebesar Rp.134.408.800.000,00. dan kemudian pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.86.000.000.000,00.
2. Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2018 sebesar Rp.21.062.774.000,00, pada tahun 2019 sebesar tidak dialokasikan. Sedangkan pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp.10.500.000.000,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, belanja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan kelompok dan jenis belanja sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
2. Pencairan Dana Cadangan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
4. Penerimaan Pinjaman Daerah.
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan antara lain mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan.
2. Penyertaan Modal Daerah.
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.
4. Pemberian Pinjaman Daerah.
5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan

Permasalahan utama berkaitan dengan pembiayaan yaitu belum mantapnya ketahanan fiskal daerah, yang berakibat pada aspek pembiayaan daerah khususnya tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah termasuk menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran.

4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum yang ditetapkan dalam menyertai pembiayaan daerah yang dapat ditempuh adalah optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya. Selain itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan yang timbul dari penyertaan modal. Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan ini, adalah alternatif pembiayaan dari sisi penerimaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dari sisi pengeluaran.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2021 ialah adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah diarahkan pada penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk investasi (penyertaan modal) ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk mengetahui Rencana Pembiayaan Daerah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2021
(Dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 2021
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	68.194.933
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	68.174.933
	2. Pencairan Dana Cadangan	-
	3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
	4. Penerimaan Pinjaman Daerah	-
	5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	20.000
	6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.500.000
	1. Pembentukan Dana Cadangan	
	2. Penyertaan Modal Daerah	11.500.000
	3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-
	4. Pemberian Pinjaman Daerah	-
	5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
	<i>Pembiayaan Netto</i>	56.694.933

(Dalam ribuan rupiah)

Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2021, dari sisi penerimaan pembiayaan diperkirakan atau diasumsikan sebesar Rp.68.194.933.000,00, dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan terdapat pengeluaran Penyertaan Modal (investasi) sebesar Rp.11.500.000.000,00. Berdasarkan kebutuhan pembiayaan daerah dihadapkan dengan kemampuan sumber pembiayaan daerah dalam Tahun Anggaran 2021, maka Pembiayaan Netto sebesar Rp.56.694.933.000,00.

Pembiayaan Netto sebesar tersebut diatas digunakan untuk menutup defisit anggaran Tahun 2021, sehingga tidak terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan atau sebesar Rp. 0,- (nol).

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan kebijakan umum belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana tersebut diatas, maka belanja daerah direncanakan untuk pembiayaan program dan kegiatan prioritas yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam lampiran II:

BAB VI

PENUTUP

Demikian gambaran ringkas mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 yang merupakan salah satu bentuk sarana dalam rangka penganggaran pembangunan daerah Kota Magelang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang merupakan program kerja Kota Magelang adalah tanggung jawab kita bersama. Akhirnya kami berharap semoga Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, hidayat serta inayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Magelang, September 2020

WALIKOTA MAGELANG

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT



LAMPIRAN I

NOTA KEUANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2021

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN APBD

KOTA MAGELANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1					2	3
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	462.735.785.000
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	139.431.921.000
1	1	1.01.2.22.0.00.02.00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	139.431.921.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.872.290.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.861.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.478.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.442.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.386.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.711.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.644.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.200.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.324.291.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95.231.658.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.010.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.112.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.827.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.684.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.213.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.213.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.776.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	53.776.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.472.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.750.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.300.000
1	1	1.01.2.22.0.00.02.00	1	2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.927.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.400.000
1	1	1.01.2.22.0.00.02.00	1	2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	16.800.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.295.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	165.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.169.544.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	919.544.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.573.133.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.600.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.025.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.557.000
1	1	1.01.2.22.0.00.02.00	1	2.09 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	250.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	629.951.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.469.631.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	24.177.530.000
1	1	1.01.2.22.0.00.02.00	2	2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.000.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.758.122.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	458.892.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	372.319.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	658.179.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.134.696.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	436.639.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	279.483.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	8.079.200.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.471.163.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	4.573.152.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02 33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	16.562.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	566.723.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	47.969.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	893.082.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	248.681.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	32.994.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.092.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.358.569.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	63.896.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.086.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	138.498.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	70.175.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	462.369.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	283.904.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	57.702.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	120.763.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	90.000.000

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1					2	3
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	05	2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	90.000.000
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	05	2.02	03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	90.000.000
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	244.405.370.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00			Dinas Kesehatan	244.405.370.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	214.426.833.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.218.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.854.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.427.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.427.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.968.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.098.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.444.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.746.763.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.700.390.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.104.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.269.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.880.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.880.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.705.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.705.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.190.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.731.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.492.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.730.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	105.245.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	3.020.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.372.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.366.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.107.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	543.167.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.092.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.127.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.465.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.492.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.374.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.796.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	157.961.584.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.10	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	157.961.584.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.499.899.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.764.782.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.150.052.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	304.919.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	249.413.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.065.302.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	2.01	16 Pengadaan Obat, Vaksin	1.742.716.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	2.01	17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.084.727.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.093.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	147.560.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.716.966.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.276.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	70.148.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	15.461.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	423.343.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	112.263.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	37.791.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	17.550.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	18.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.600.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	48.004.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	21.902.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	152.322.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.417.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	298.944.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	2.02	20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	352.001.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	13.975.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	932.473.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	431.699.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15.132.345.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	51.250.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.184.640.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	573.237.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	329.463.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	307.331.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6.927.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	118.604.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	3.104.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3.104.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.047.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	15.047.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	52.041.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	52.041.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	21.263.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30.778.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	276.270.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UM)	24.065.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, T	24.065.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	42.184.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	42.184.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12.982.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12.982.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	24.239.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	24.239.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	172.800.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	172.800.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	150.327.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat D	119.777.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	119.777.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.405.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5.405.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.145.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25.145.000
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50.870.280.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.419.874.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.202.257.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.220.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.624.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.944.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	8.865.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.000.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.787.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.674.447.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.597.290.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.835.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.884.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.438.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.500.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.995.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.058.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.500.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.665.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.520.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	25.300.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.820.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.132.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	720.486.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.743.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238.548.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.995.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.200.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	529.609.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.737.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.863.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	100.000.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.715.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.00	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	6.000.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.294.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.206.000.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.206.000.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.206.000.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.404.000.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.404.000.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	3.147.500.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	256.500.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	15.395.988.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	15.395.988.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	372.740.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	15.023.248.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.281.970.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.281.970.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	09	2.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	31.970.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.250.000.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.005.000.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3.005.000.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	480.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.00	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.585.000.000
1	3	1.03.0.00.0.00.01.00	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	940.000.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	300.330.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	44.949.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	18.700.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	26.249.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	54.738.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	16.270.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	38.468.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	200.643.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	16.202.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	184.441.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	624.329.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	260.248.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	260.248.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	364.081.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	104.196.000
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	259.885.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.450.406.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.449.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.449.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.449.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	786.002.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	786.002.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	74.878.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	129.670.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	101.058.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	36.424.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	375.241.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	68.731.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	6.798.431.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.798.431.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	250.000.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	420.768.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	06	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	5.977.663.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	06	2.01	15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	150.000.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	56.120.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	56.120.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	07	2.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11.120.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	07	2.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	9.806.404.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	9.806.404.000
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	7.700.000.000
1	3	1.04.2.10.1.03.02.00	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	1.906.404.000
1	3	1.04.2.10.1.03.02.00	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	200.000.000

KODE				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN
1				2		3
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.756.385.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.192.931.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.066.318.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.165.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.535.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.589.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.505.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.399.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.137.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.245.518.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.198.062.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.676.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.172.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.411.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.197.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.280.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.280.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.765.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.940.000
1	4	1.04.2.10.1.03.02.00	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.169.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.314.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.360.000
1	4	1.04.2.10.1.03.02.00	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	19.027.000
1	4	1.04.2.10.1.03.02.00	1	2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.850.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.105.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.280.000
1	4	1.04.2.10.1.03.02.00	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	220
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.000.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194.060.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.310.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.911.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.900.000
1	4	1.04.2.10.1.03.02.00	1	2.09	5 Pemeliharaan Mebel	4.995.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.595.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.909.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.551.743.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	75.000.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02	2.01	01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	75.000.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02	2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	29.871.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02	2.02	03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	29.871.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.311.872.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02	2.05	02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.311.872.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02	2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	135.000.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02	2.06	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	135.000.000
1	4	1.04.2.10.1.03.02.00	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.437.756.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	03	2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	699.211.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	03	2.01	02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	678.187.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	03	2.01	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	21.024.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	35.000.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	03	2.02	05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	35.000.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	703.545.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	03	2.03	04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	703.545.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.137.114.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.137.114.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.010.571.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	126.543.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00			Dinas Lingkungan Hidup	563.454.000
1	04	2.11.1.04.2.15.01.00	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	563.454.000
1	04	2.11.1.04.2.15.01.00	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	563.454.000
1	04	2.11.1.04.2.15.01.00	05	2.01	02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	550.072.000
1	04	2.11.1.04.2.15.01.00	05	2.01	03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	13.382.000
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.250.041.000
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00			Satuan Polisi Pamong Praja	10.250.041.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.515.465.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.490.000

KODE				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN			JUMLAH ANGGARAN
1				2			3
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	6.500.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	3.204.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	3.204.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	546.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	546.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.490.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	5.868.691.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	5.865.691.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum PerangkatDaerah	131.034.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.716.000
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.374.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	6.157.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	2.280.000
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	3.470.000
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.800.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.237.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	114.760.000
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.250.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	41.510.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.490.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.154.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227.901.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	16.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	19.435.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.844.535.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.579.263.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.195.823.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	291.360.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	92.080.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	265.272.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	93.151.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	172.121.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	890.041.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	890.041.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	890.041.000
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.021.788.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00				Dinas Sosial	7.021.788.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.369.297.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.300.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	4.000.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	1.500.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.500.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	1.000.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.300.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	3.098.283.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	3.082.341.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.435.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.507.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum PerangkatDaerah	49.427.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.020.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	280.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.201.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	3.887.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	1.200.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	4.748.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	889
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.202.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	91.522.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.207.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.400.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	53.915.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.765.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.200.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.140.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.700.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.725.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	72.382.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	72.382.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52.130.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.252.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.227.781.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	840.947.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	21.689.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	53.215.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	78.101.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	687.942.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	2.386.834.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	62.434.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	57.319.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	537.007.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	523.417.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	21.255.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	1.185.402.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	256.545.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	256.545.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	55.001.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	201.544.000
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	11.980.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	11.980.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	11.980.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	83.803.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	83.803.000
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	83.803.000
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	88.337.302.000
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.657.485.000
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00				Dinas Tenaga Kerja	5.657.485.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.412.217.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.274.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.357.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.188.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.423.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.269.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.870.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.167.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.688.383.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.686.428.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.955.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.184.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.960.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.277.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	15.245.000
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.472.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.830.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.651.000
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.781.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.870.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.725.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.665.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.750.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.500.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.810.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	998.442.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	992.875.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	992.875.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	5.567.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	5.567.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	135.890.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	92.646.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	33.436.000
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	30.010.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	29.200.000
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	43.244.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	10.000.000
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	33.244.000
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	110.936.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	110.936.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.902.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.500.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	27.534.000
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	572.945.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	572.945.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	288.660.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	92.000.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	15.000.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	77.000.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	196.660.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	132.642.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	64.018.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	87.704.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah	87.704.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban	87.704.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	100.042.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.042.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.042.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	7.850.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.850.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	7.850.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	88.689.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	88.689.000
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	88.689.000
2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	252.907.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00				Dinas Pertanian dan Pangan	252.907.000
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	167.933.000
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	67.933.000
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	35.129.000
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	32.804.000
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100.000.000
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100.000.000
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	84.974.000
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	84.974.000
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	84.974.000
2	10					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	351.636.000
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	351.636.000
2	10	1.04.2.10.1.03.02.00	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	50.000.000
2	10	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
2	10	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
2	10	1.04.2.10.1.03.02.00	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	301.636.000
2	10	1.04.2.10.1.03.02.00	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	301.636.000
2	10	1.04.2.10.1.03.02.00	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	201.636.000
2	10	1.04.2.10.1.03.02.00	10	2.01	02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	23.751.277.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00				Dinas Lingkungan Hidup	23.751.277.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.151.214.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.692.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.286.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.812.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.862.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.155.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.941.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.636.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.273.172.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.221.215.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.669.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41.200.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.088.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.316.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.316.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.801.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.652.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.830.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.239.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.180.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	10.952.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	16.200.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.748.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.872.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.528.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.900.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.444.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.236.361.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	204.191.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	961.707.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	3.100.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.788.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.575.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	85.338.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	85.338.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	85.338.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	761.141.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	581.583.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	504.591.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	76.992.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	179.558.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	179.558.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.121.962.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5.121.962.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	4	2.01	3	Pengelolaan Kebun Raya	1.961.280.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.160.682.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	6.886.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	5	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	6.886.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan	6.886.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	78.062.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78.062.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78.062.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	250.888.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.888.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	3.504.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	247.384.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	4.573.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	4.573.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	4.573.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.291.213.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	11	2.01		Pengelolaan Sampah	6.261.281.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	126.989.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.929.342.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	204.950.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	29.932.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	29.932.000
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.459.477.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.459.477.000

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1					2	3
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.084.800.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.330.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01 01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	2.282.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01 02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	1.741.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	827.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01 05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	480.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	3.679.536.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	3.657.477.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.059.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	Administrasi Umum PerangkatDaerah	39.303.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.595.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	2.000.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	9.953.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.755.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	316.009.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.400.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.600.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	123.009.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.622.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.836.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.406.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	10.380.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	294.109.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	2	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	294.109.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	131.436.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01 07	Penerbitan Dokumen atas HasilPelaporan Peristiwa Kependudukan	162.673.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	80.568.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	3	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	80.568.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	80.568.000
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.176.491.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.176.491.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.845.505.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.826.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.01 01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	9.000.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.01 02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	6.832.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.01 03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	4.246.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	5.506.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.01 05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	5.281.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.961.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.02	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	3.812.586.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	3.810.421.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.165.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.06	Administrasi Umum PerangkatDaerah	188.404.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.305.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	1	2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.695.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	11.490.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	1.800.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	1	2.06 7	Penyediaan Bahan/Material	36.594.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	1	2.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.840.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.680.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	462.363.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	1	2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	277.400.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	183.313.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.326.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.550.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	119.980.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	1	2.09 5	Pemeliharaan Mebel	1.900.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	43.200.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	113.696.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	231.767.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	3	2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	231.767.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	03	2.01 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	231.767.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	33.891.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	33.891.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	4	2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	33.891.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	65.328.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.328.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	05	2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	65.328.000

KODE				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN
1				2		3
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	245.202.000
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	245.202.000
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	200.377.000
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	200.377.000
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	02	2.02	11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	200.377.000
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	37.510.000
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	11.610.000
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	03	2.01	04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	11.610.000
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	25.900.000
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	03	2.03	03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	11.950.000
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	03	2.03	11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	13.950.000
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.315.000
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.315.000
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	04	2.01	04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7.315.000
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	13.641.094.000
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00			Dinas Lingkungan Hidup	6.836.771.000
2	15	2.11.1.04.2.15.01.00	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.836.771.000
2	15	2.11.1.04.2.15.01.00	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.836.771.000
2	15	2.11.1.04.2.15.01.00	02	2.02	02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	185.154.000
2	15	2.11.1.04.2.15.01.00	02	2.02	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	6.651.617.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			Dinas Perhubungan	6.804.323.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.330.264.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.043.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.539.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.570.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.934.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.565.806.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.553.206.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.600.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.500.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.500.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.191.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.601.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.515.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.246.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.844.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	6.617.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	3.660.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.708.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.550.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	13.750.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.800.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.572.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.012.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.560.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.602.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.425.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.855.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.520.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.802.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.474.059.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	143.780.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.02	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	43.780.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	248.072.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.03	03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	237.692.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.03	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	10.380.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	31.406.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.04	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	31.406.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.516.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.05	03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	24.076.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.05	04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	38.630.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.05	07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	37.810.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	927.611.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.06	04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	924.320.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.06	05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	3.291.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	8.074.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.08	03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	8.074.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.600.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	14.600.000
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.342.477.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00				Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	9.342.477.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.766.897.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.869.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.808.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.184.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.175.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	600.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	600.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.502.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.923.309.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.903.353.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.882.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.074.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.123.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.123.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.812.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.643.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.240.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.285.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.472.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	14.360.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.960.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	266.352.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.961.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.461.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.823.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137.704.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.814.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.305.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	969.389.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	969.389.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	130.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	741.482.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	27.783.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	70.124.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.606.191.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.240.945.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.240.945.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	365.246.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	75.676.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	165.159.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	116.151.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8.260.000
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	899.918.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	899.918.000
2	17	3.31.3.30.2.17.01.00	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	509.879.000
2	17	3.31.3.30.2.17.01.00	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	509.879.000
2	17	3.31.3.30.2.17.01.00	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	353.464.000
2	17	3.31.3.30.2.17.01.00	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	156.415.000
2	17	3.31.3.30.2.17.01.00	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	390.039.000
2	17	3.31.3.30.2.17.01.00	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	390.039.000
2	17	3.31.3.30.2.17.01.00	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	390.039.000
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.093.162.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.093.162.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.603.242.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.605.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.048.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.908.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.537.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.769.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.600.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.743.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.052.493.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.049.896.000

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	
1					2	3	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	577.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.508.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	512.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.510.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.330.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.350.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	3.880.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.410.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.600.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.713.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.440.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.923.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.921.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.525.750
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.757.250
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.638.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	22.506.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.506.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	22.506.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	67.205.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	67.205.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	46.810.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	20.395.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	340.817.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	340.817.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	248.019.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	91.343.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1.455.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	28.615.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.615.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	22.221.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	4.118.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	2.276.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	30.777.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.777.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30.777.000
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.671.197.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00				Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	10.671.197.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.627.036.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.125.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.790.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.893.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.940.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.728.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.974.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.800.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.825.657.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.660.931.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.705.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	158.230.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.791.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.140.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.994.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.855.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	35.681.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.980.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.630.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.270.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.400.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.870.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.844.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.988.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.957.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	2.000.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.539.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.360.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	612.712.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	136.859.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	111.187.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	10.701.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	14.971.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	475.853.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	475.853.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.184.200.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.629.954.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.629.954.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	728.045.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	728.045.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.629.789.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	2.629.789.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	196.412.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	196.412.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	247.249.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	247.249.000
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	247.249.000
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	267.532.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00				Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	267.532.000
2	20	2.16.2.20.2.21.02.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	267.532.000
2	20	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	267.532.000
2	20	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	267.532.000
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	95.351.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00				Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	95.351.000
2	21	2.16.2.20.2.21.02.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	95.351.000
2	21	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.342.000
2	21	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	19.342.000
2	21	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	76.009.000
2	21	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	76.009.000
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.928.836.000
1	1	1.01.2.22.0.00.02.00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.928.836.000
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.600.110.000
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.100.110.000
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.022.110.000
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	78.000.000
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	500.000.000
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	65.726.000
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.726.000
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	65.726.000
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	15.000.000
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	15.000.000
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	15.000.000
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	248.000.000
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	248.000.000
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	25.000.000
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	223.000.000
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.718.896.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.718.896.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.453.172.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.190.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.335.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.675.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.450.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.738.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.791.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.201.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.210.932.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.150.296.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.961.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.675.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.068.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.357.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.495.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.212.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.205.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.963.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	38.680.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.156.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620.470.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.752.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245.718.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.512.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.040.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.980.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	6.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.950.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.542.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	265.724.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	253.525.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	3.863.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	42.114.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	9.875.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	9.183.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	188.490.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.199.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	12.199.000
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	211.419.000
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	211.419.000
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	180.898.000
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	86.514.000
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	86.514.000
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	94.384.000
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	94.384.000
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	30.521.000
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	30.521.000
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	30.521.000
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26.271.139.000
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	377.154.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00				Dinas Pertanian dan Pangan	377.154.000
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	282.349.000
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	133.941.000
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	72.572.000
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	61.369.000
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	148.408.000
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	148.408.000
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	94.805.000
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	41.984.000
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	41.984.000
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	52.821.000
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	52.821.000
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.872.590.000
3	19	2.19.3.26.0.00.02.00				Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.872.590.000
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	336.731.000
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	336.731.000
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	336.731.000
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.518.265.000
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.518.265.000
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	243.705.000
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.185.166.000
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	27.584.000
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	61.810.000
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	17.594.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	17.594.000
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	17.594.000
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	8.185.704.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00				Dinas Pertanian dan Pangan	8.185.704.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.312.072.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.400.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.01	01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	7.500.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.900.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	5.745.182.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	5.726.282.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.900.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.06		Administrasi Umum PerangkatDaerah	122.491.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.320.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	5.000.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	8.000.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.800.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.371.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	315.566.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.137.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.196.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	163.233.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.433.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.149.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.677.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	4.607.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	382.666.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	02	2.01		Pengawasan Penggunaan SaranaPertanian	52.605.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	52.605.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	330.061.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian danKelestarian SDG Hewan/Tanaman	247.868.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	82.193.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	882.569.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.562.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	17.562.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	17.562.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	17.562.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	471.981.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan JasaLaboratorium	22.550.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa MedikVeteriner	449.431.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	335.329.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	147.271.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan danProduk Hewan	30.000.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.04	03	Penetapan PemenuhanPersyaratan Teknis	158.058.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	40.135.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan UnitKesejahteraan Hewan	40.135.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	125.331.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	05	2.01		Pengendalian dan PenanggulanganBencana Pertanian Kabupaten/Kota	125.331.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	32.429.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	92.902.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	17.562.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.562.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	17.562.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	465.504.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	465.504.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	13.571.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	258.247.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	193.686.000
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.033.203.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.033.203.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.879.814.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	2.879.814.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.446.895.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola SaranaDistribusi Perdagangan	432.919.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	71.469.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	71.469.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	5	2,01	3	Pameran Dagang Lokal	71.469.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	81.920.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	06	2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	81.920.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	81.920.000
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	12.802.488.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.802.488.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.566.086.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.052.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,01	01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	2.750.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,01	02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	950.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,01	03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	935.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	922.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,01	05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	945.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.550.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,02		Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	11.093.876.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	11.046.565.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45.811.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,06		Administrasi Umum PerangkatDaerah	192.146.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.041.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.340.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	25.620.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	7.800.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	1	2,06	7	Penyediaan Bahan/Material	17.357.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.588.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	837.472.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	580.000.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	257.472.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	433.540.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.400.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.833.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.262.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	44.045.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	236.402.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	02	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	236.402.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	02	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	193.578.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	02	2,01	06	Evaluasi terhadap PelaksanaanRencana Pembangunan Industri	42.824.000
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	62.201.349.000
4	1					SEKRETARIAT DAERAH	32.646.227.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00				Sekretariat Daerah	32.646.227.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.600.735.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.400.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,01	01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	5.774.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,01	02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	5.825.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,01	03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	5.899.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	5.391.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,01	05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	5.891.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.620.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,02		Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	18.575.845.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	18.499.267.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	76.578.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,05		Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah	8.600.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas BesertaAtribut Kelengkapannya	8.600.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,06		Administrasi Umum PerangkatDaerah	2.399.271.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	150.000.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan RumahTangga	10.000.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.714.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	89.382.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	73.260.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2,06	7	Penyediaan Bahan/Material	81.771.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	739.634.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.113.510.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	294.680.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	94.680.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya	200.000.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	2.314.045.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.580.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.659.420.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	618.045.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.217.444.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	447.700.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.335.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	59.900.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.825.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.300.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	15.000.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	323.384.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	848.574.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	184.474.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	64.100.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	406.501.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	237.838.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	89.743.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	78.920.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2.13		Penataan Organisasi	658.200.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	205.731.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	192.987.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	259.482.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.839.175.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	429.833.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	954.881.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	454.461.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.084.022.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	962.667.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	677.417.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	127.293.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	157.957.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.400.233.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.214.198.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	71.071.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	114.964.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	709.759.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	356.056.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	295.194.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	58.509.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	11.363.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	11.363.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	961.470.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	197.425.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	80.319.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	102.780.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	14.326.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	522.620.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	449.652.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	72.968.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	194.887.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	108.145.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	38.662.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	48.080.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	46.538.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25.011.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	21.527.000
4	2					SEKRETARIAT DPRD	29.555.122.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	29.555.122.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.773.379.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.804.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.433.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.140.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.830.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.431.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.999.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.971.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.336.876.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.256.862.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.035.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	78.979.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	483.105.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	483.105.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.639.192.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.993.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.317.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.848.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.197.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.518.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	94.040.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	117.349.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.201.330.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	795.826.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.223.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.800.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	545.803.000

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1					2	3
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	742.825.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.600.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.585.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.944.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	372.696.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	10.629.354.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15	01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.372.350.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15	02 Penyediaan Pakiaian Dinas dan Atribut DPRD	194.504.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15	03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	62.500.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	2.16	Layanan Administrasi DPRD	5.124.397.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.16	03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4.992.397.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.16	04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	132.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.781.743.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.396.107.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	184.318.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.211.789.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	102.216.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.02	1 Pembahasan KUA dan PPAS	27.991.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	27.991.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.02	3 Pembahasan APBD	14.503.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.02	4 Pembahasan APBD Perubahan	14.503.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	17.228.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	9.576.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	9.576.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.893.194.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.04	2 Bimbingan Teknis DPRD	1.360.250.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.04	3 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	170.877.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04	04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	168.950.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.04	5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	171.661.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.04	7 Penyusunan Program Kerja DPRD	21.456.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	904.592.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.05	02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	14.105.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.05	3 Pelaksanaan Reses	890.487.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	476.058.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.08	01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	469.800.000
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.08	2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	6.258.000
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	77.350.542.000
5	1				PERENCANAAN	6.810.764.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.810.764.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.535.047.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.551.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.968.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.150.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.141.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.240.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.280.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.772.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.984.961.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.959.371.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.495.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.507.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.588.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.185.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.991.000
5	1	5.01.0.00.0.00.40.00	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.735.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.595.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.360.000
5	1	5.01.0.00.0.00.40.00	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material	13.560.000
5	1	5.01.0.00.0.00.40.00	1	2.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.376.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.568.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.939.000
5	1	5.01.0.00.0.00.40.00	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.158.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.800.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.981.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.411.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.640.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.040.000
5	1	5.01.0.00.0.00.40.00	1	2.09	5 Pemeliharaan Mebel	1.000.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.738.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.993.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	621.457.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	533.957.000
5	1	5.01.0.00.0.00.40.00	2	2.01	3 Pelaksanaan Konsultasi Publik	28.739.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02	2.01	04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	85.420.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02	2.01	05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	142.980.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	276.818.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	42.500.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	42.500.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	45.000.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	45.000.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	654.260.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	285.756.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	31.229.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	87.464.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	167.063.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	172.069.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	43.495.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	36.752.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	91.822.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	196.435.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.435.000
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	171.000.000
5	2					KEUANGAN	41.030.879.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	41.030.879.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.515.552.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.500.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.586.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.681.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.415.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.049.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.049.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.720.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.295.003.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.225.901.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.667.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	53.435.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.947.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	39.947.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.225.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.464.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	13.530.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	6.955.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	21.576.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.300.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.511.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73.992.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	365.124.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.395.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.405.366.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.582.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.689.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.306.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	144.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	703.789.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	11.994.831.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	473.384.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	47.647.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	46.309.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	48.297.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	47.970.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	12.437.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	12.437.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	137.433.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	120.854.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	238.034.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	10.560.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	14.314.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	14.650.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	37.841.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	134.139.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	26.530.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	283.413.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	36.450.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	31.256.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	99.376.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	16.794.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	29.553.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	13.007.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	56.977.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.000.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	11.000.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	16.366.099.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	16.366.099.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	41.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	30.645.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	178.775.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	181.212.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	15.368.101.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	311.286.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	65.218.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	65.240.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	90.397.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	34.225.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.154.397.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.154.397.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	620.690.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3.865.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5.993.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	63.137.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	28.681.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	65.271.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	9.898.000
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	322.484.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	18.310.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16.068.000
5	3					KEPEGAWAIAN	22.804.148.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	22.804.148.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.544.027.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.257.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.652.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.847.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.632.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.000.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.121.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.544.000
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.461.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.135.667.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.122.349.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.318.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.900.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.500.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	12.400.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.108.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.062.000
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.585.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.107.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	9.428.000
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.160.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.120.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.646.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.465.000
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.161.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.600.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.704.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.630.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.494.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.405.000
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	3.400.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.331.000
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	3.000.000
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.260.121.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	926.412.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	24.735.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	773.644.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	89.873.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.300.000
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	14.210.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	11.650.000
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	89.585.000
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	8.467.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	22.800.000
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	58.318.000
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	53.022.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	12.720.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	15.000.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	25.302.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	191.102.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	45.130.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	79.292.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	10.700.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	8.950.000
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	14.960.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10.600.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	5.020.000
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	16.450.000
5	4					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.759.091.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.759.091.000
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.759.091.000
5	4	5.03.5.04.0.00.01.00	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	208.801.000
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	208.801.000
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.550.290.000
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	48.920.000
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.501.370.000
5	5					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.945.660.000
5	5	5.05.0.00.0.00.01.00				Badan Penelitian dan Pengembangan	3.945.660.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.482.666.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.363.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.709.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.200.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.186.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.826.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.337.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.105.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.099.512.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.065.660.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.899.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.953.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.961.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.750.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.613.000
5	5	5.05.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.934.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.082.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.340.000
5	5	5.05.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	21.206.000
5	5	5.05.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.776.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.260.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.428.000
5	5	5.05.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.892.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.236.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.402.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.864.000
5	5	5.05.0.00.0.00.01.00	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	2.000.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.538.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	462.994.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	159.109.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	100.780.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	8.604.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	49.725.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	303.885.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	69.524.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	145.834.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	88.527.000
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.279.287.000
6	1					INSPEKTORAT DAERAH	6.279.287.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00				Inspektorat	6.279.287.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.688.406.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.136.474.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.126.774.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.700.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.602.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.602.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.207.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.747.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.680.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.724.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	9.052.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.680.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.324.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.928.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.467.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.461.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.195.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.425.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.770.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	3.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	186.785.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	161.785.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	50.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	7.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	25.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	69.785.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	25.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	15.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	404.096.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	4.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	4.000.000
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	400.096.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	78.577.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	225.769.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegekan Integritas	92.750.000
7						UNSUR KEWILAYAHAN	39.451.553.000
7	1					KECAMATAN	39.451.553.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00				Kecamatan Magelang Selatan	13.102.884.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.754.629.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.807.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.265.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.602.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.602.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.169.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.169.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.664.296.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	8.645.428.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.868.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum PerangkatDaerah	284.026.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.622.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	2.675.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.407.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	35.839.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	16.020.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	23.185.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.082.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.196.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	1.363.665.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.180.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	1.171.485.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.835.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.135.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.891.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	60.244.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	117.565.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.848.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	50.848.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	11.320.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.528.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.241.293.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.241.293.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	119.245.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan	568.063.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	1.540.624.000
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	13.361.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	52.994.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum	52.994.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	46.874.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.120.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.120.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.120.000
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.120.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00				Kecamatan Magelang Tengah	13.764.195.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.709.192.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.987.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	8.862.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	6.705.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	7.104.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	7.885.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	6.972.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.459.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.02		Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	8.820.799.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	8.820.799.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06		Administrasi Umum PerangkatDaerah	282.316.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.424.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.820.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	40.340.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	21.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	32.602.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.096.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.034.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	1.158.833.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.518.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	972.315.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.257.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.193.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.971.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	32.194.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	53.899.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.367.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.787.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.787.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	28.580.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	18.065.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10.515.000

KODE				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN			JUMLAH ANGGARAN
1				2			3
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.953.636.000
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.953.636.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	84.543.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.167.772.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.701.321.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	65.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65.000.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	65.000.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00				Kecamatan Magelang Utara	12.584.474.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.614.132.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.884.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.353.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.885.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.712.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.282.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.255.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.397.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.142.164.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.093.015.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	49.149.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.629.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.345.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.141.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.645.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.988.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.910.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.220.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	27.197.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.435.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.748.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	669.622.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.261.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.068.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	454.293.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.833.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.634.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.437.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.054.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.708.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	146.585.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.072.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.072.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	87.924.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	31.192.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	42.413.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.319.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	55.589.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	55.589.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.728.355.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.728.355.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	106.154.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	970.572.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.646.325.000
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	5.304.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	95.402.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95.402.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	95.402.000
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.653.978.000
8	1					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.653.978.000
8	1	8.01.0.00.0.00.01.00				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.653.978.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.965.503.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.733.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.636.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.600.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.650.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.100.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.900.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.847.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.337.448.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.321.285.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.559.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.604.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.212.000

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.222.000
8	1	8.01.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.197.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	11.958.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	3.000.000
8	1	8.01.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	25.719.000
8	1	8.01.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.480.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.636.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	167.409.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.400.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	123.009.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.701.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.485.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.916.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	19.300.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	327.627.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	327.627.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	327.627.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	665.076.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	665.076.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	82.477.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	582.599.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	89.538.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	89.538.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	89.538.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	119.717.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	119.717.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	87.130.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	32.587.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06			PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	486.517.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	486.517.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	486.517.000
TOTAL							768.280.935.000

LAMPIRAN II
NOTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD
KOTA MAGELANG

**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1					2
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1	1	1.01.2.22.0.00.02.00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPC
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPC
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPC
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPC
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1	1	1.01.2.22.0.00.02.00	1	2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1	1	1.01.2.22.0.00.02.00	1	2.06 7	Penyediaan Bahan/Material
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	1	1.01.2.22.0.00.02.00	1	2.09 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1	1	1.01.2.22.0.00.02.00	2	2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02 33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1						2
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraar
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	1.01.2.22.0.00.02.00	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00				Dinas Kesehatan
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Bera
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1						2
1	2	1.02.0.00.0.00.01.00	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPE
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPE
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPE
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	3	1.03.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1	3	1.03.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
1	3	1.03.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	3	1.03.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1						2
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besi
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	3	1.03.0.00.0.00.01.00	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	09	2.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1	3	1.03.0.00.0.00.01.00	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan
1	3	1.03.0.00.0.00.01.00	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	06	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	06	2.01	15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	07	2.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	07	2.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1	03	1.04.2.10.1.03.02.00	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1						2
1	3	1.04.2.10.1.03.02.00	10	2,01	9	Rehabilitasi Jalan
1	3	1.04.2.10.1.03.02.00	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	4	1.04.2.10.1.03.02.00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1	4	1.04.2.10.1.03.02.00	1	2,06	7	Penyediaan Bahan/Material
1	4	1.04.2.10.1.03.02.00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	4	1.04.2.10.1.03.02.00	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1	4	1.04.2.10.1.03.02.00	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02	2,01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02	2,01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02	2,02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02	2,02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPF
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02	2,05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02	2,05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02	2,06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	02	2,06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1	4	1.04.2.10.1.03.02.00	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	03	2,01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	03	2,01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	03	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	03	2,02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Hektar
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	03	2,02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	03	2,03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Hektar
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	03	2,03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2,01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Huniar
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00				Dinas Lingkungan Hidup
1	04	2.11.1.04.2.15.01.00	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1	04	2.11.1.04.2.15.01.00	05	2,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1	04	2.11.1.04.2.15.01.00	05	2,01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Huniar
1	04	2.11.1.04.2.15.01.00	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00				Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN		
1				2		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPC
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPC
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	5	1.05.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalar
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00				Dinas Sosial
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPC
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPC
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPC
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
1					2	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan ReunifikasiKeluarga
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	04	2.02	10	Pemberian Akses ke LayananPendidikan dan Kesehatan Dasar
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	4	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir MiskinCakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin CakupanDaerah Kabupaten/Kota
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir MiskinCakupan Daerah Kabupaten/Kota
1	6	1.06.0.00.0.00.01.00	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban BencanaAlam dan Sosial Kabupaten/Kota
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagiKelompok Rentan
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	07	2.01		Pemeliharaan Taman MakamPahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1	06	1.06.0.00.0.00.01.00	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00				Dinas Tenaga Kerja
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan PerangkatDaerah
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum PerangkatDaerah
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkanUnit Kompetensi
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan KerjaSwasta
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga PelatihanKerja Swasta
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di DaerahKabupaten/Kota
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	04	2.01	01	Penyediaan Sumber DayaPelayanan antar Kerja
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	04	2.01	03	Penyuluhan dan BimbinganJabatan bagi Pencari Kerja

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1					2
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00	4	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	04	2.03	02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00	4	2.03	3 Job Fair/Bursa Kerja
2	7	2.07.3.32.0.00.01.00	5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	05	2.02	01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	05	2.02	02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	2.07.3.32.0.00.01.00	05	2.02	04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	02	2.02	01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	02	2.02	02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	02	2.03	02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	02	2.03	03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	03	2.03	02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	04	2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	04	2.03	01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	05	2.01	02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	08	2.13.2.08.2.14.01.00	06	2.02	01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00			Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	03	2.01	01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	03	2.01	02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	03	2.04	02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2	09	3.27.2.09.3.25.01.00	05	2.01	04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1	04	1.04.2.10.1.03.02.00			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	10	1.04.2.10.1.03.02.00	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2	10	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	10	1.04.2.10.1.03.02.00	05	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	10	1.04.2.10.1.03.02.00	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2	10	1.04.2.10.1.03.02.00	10	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
2	10	1.04.2.10.1.03.02.00	10	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2	10	1.04.2.10.1.03.02.00	10	2.01	02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00			Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
1					2	
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPC
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPC
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPC
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPC
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	4	2.01	3	Pengelolaan Kebun Raya
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	5	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	11	2.01		Pengelolaan Sampah
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahar
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swast
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
1				2	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPC
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	2	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	3	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPC
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPC
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	1	2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	1	2.09	5 Pemeliharaan Mebel
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	3	2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	03	2.01	02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	4	2.01	11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1					2
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00	05	2.01	03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	2.13.2.08.2.14.01.00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	02	2.02	11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	03	2.01	04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	03	2.03	03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	03	2.03	11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	2.13.2.08.2.14.01.00	04	2.01	04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2	11	2.11.1.04.2.15.01.00			Dinas Lingkungan Hidup
2	15	2.11.1.04.2.15.01.00	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2	15	2.11.1.04.2.15.01.00	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	2.11.1.04.2.15.01.00	02	2.02	02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	2.11.1.04.2.15.01.00	02	2.02	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00			Dinas Perhubungan
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	1	2.07	5 Pengadaan Mebel
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.02	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.03	03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.03	04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.04	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.05	03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.05	04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.05	07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1					2
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.06	04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.06	05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.08	03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.14	01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00			Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPC
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPC
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPC
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	1	2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	1	2.06	7 Penyediaan Bahan/Material
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	1	2.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2.01	05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	2	2.01	6 Pelayanan Informasi Publik
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2.01	10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2.01	12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	03	2.01	03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	03	2.02	06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	03	2.02	08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	03	2.02	09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00	03	2.02	10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	17	3.31.3.30.2.17.01.00	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2	17	3.31.3.30.2.17.01.00	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2	17	3.31.3.30.2.17.01.00	07	2.01	02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
2	17	3.31.3.30.2.17.01.00	07	2.01	04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2	17	3.31.3.30.2.17.01.00	8		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2	17	3.31.3.30.2.17.01.00	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
2	17	3.31.3.30.2.17.01.00	08	2.01	01 Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
1					2	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPC
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan PerangkatDaerah
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPC
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPC
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum PerangkatDaerah
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Penyusunan Strategi PromosiPenanaman Modal
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Moda
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Moda
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Moda
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Moda
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00				Dinas Kepemudaan, Olah Raga danPariwisata
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.01	05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPC
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.02		Administrasi Keuangan PerangkatDaerah
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPC
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPC
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.06		Administrasi Umum PerangkatDaerah
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
1					2	
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	02	2,01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	02	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	02	2,01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	02	2,01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	02	2,02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	02	2,02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2,01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2,02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2,02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2,03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	3	2,03	1	Seleksi Atlet Daerah
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2,05		Pembinaan dan PengembanganOlahraga Rekreasi
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2,05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	04	2,01		Pembinaan dan PengembanganOrganisasi Kepramukaan
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00	04	2,01	02	Peningkatan Kapasitas OrganisasiKepramukaan Tingkat Daerah
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00				Dinas Komunikasi, Informatika, danStatistik
2	20	2.16.2.20.2.21.02.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2	20	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2,01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	20	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektora
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2	16	2.16.2.20.2.21.02.00				Dinas Komunikasi, Informatika, danStatistik
2	21	2.16.2.20.2.21.02.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2	21	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2,01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	21	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2	21	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2,02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2	21	2.16.2.20.2.21.02.00	02	2,02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1	1	1.01.2.22.0.00.02.00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2,01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2,01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2,01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan PranataKebudayaan
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2,02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	02	2,02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	03	2,01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	03	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Tata KelolaLembaga Kesenian Tradisional
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	05	2,02		Pengelolaan Cagar Budaya PeringkatKabupaten/Kota
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	5	2,02	2	Pengembangan Cagar Budaya
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	06	2,01		Pengelolaan MuseumKabupaten/Kota
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	06	2,01	03	Peningkatan Pelayanan dan AksesMasyarakat Terhadap Museum
2	22	1.01.2.22.0.00.02.00	06	2,01	04	Penyediaan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana Museum
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2,01	01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2,01	02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
1					2	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPC
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPC
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPC
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
2	24	2.23.2.24.0.00.02.00	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00				Dinas Pertanian dan Pangan
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3	25	3.27.2.09.3.25.01.00	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
2	19	2.19.3.26.0.00.02.00				Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
1					2	
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3	26	2.19.3.26.0.00.02.00	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00				Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3	27	3.27.2.09.3.25.01.00	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
1					2	
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	5	2,01	3	Pameran Dagang Lokal
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	06	2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
3	30	3.31.3.30.2.17.01.00	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPC
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPC
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPC
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	1	2,06	7	Penyediaan Bahan/Material
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	02	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	02	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
3	31	3.31.3.30.2.17.01.00	02	2,01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	1					SEKRETARIAT DAERAH
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00				Sekretariat Daerah
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPC
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPC
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2,06	7	Penyediaan Bahan/Material
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2,07	5	Pengadaan Mebel
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1						2
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11		Administarsi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2.13		Penataan Organisasi
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah
4	1	4.01.0.00.0.00.01.00	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUC
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
4	2					SEKRETARIAT DPRD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
1					2	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15		Layanan Keuangan danKesejahteraan DPRD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15	01	Penyelenggaraan AdministrasiKeuangan DPRD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas danAtribut DPRD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check UpDPRD
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi danKonsultasi DPRD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan RumahTangga DPRD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah danPeraturan DPRD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA danPerubahan PPAS
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.02	3	Pembahasan APBD
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	06	Pembahasan PertanggungjawabanAPBD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangar
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.04	2	Bimbingan Teknis DPRD
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar danTim Ahli
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.05		Penyerapan dan PenghimpunanAspirasi Masyarakat
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok PikiranDPRD
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.08	01	Koordinasi dan KonsultasiPelaksanaan Tugas DPRD
4	2	4.02.0.00.0.00.01.00	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5	1					PERENCANAAN
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00				Badan Perencanaan PembangunanDaerah
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.01	01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.01	02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.01	03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.01	05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.02		Administrasi Keuangan PerangkatDaerah
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.06		Administrasi Umum PerangkatDaerah
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5	1	5.01.0.00.0.00.40.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
5	1	5.01.0.00.0.00.40.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
5	1	5.01.0.00.0.00.40.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
5	1	5.01.0.00.0.00.40.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1						2
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5	1	5.01.0.00.0.00.40.00	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5	1	5.01.0.00.0.00.40.00	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
5	01	5.01.0.00.0.00.40.00	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
5	2					KEUANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
1					2	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPC
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBC
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
5	2	5.02.0.00.0.00.01.00	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
5	02	5.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
5	3					KEPEGAWAIAN
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00				Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
1					2	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian danInformasi Kepegawaian ASN
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01	03	Koordinasi dan FasilitasiPengadaan PNS dan PPPK
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01	06	Koordinasi PelaksanaanAdministrasi Pemberhentian
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem InformasiKepegawaian
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi danSistem Informasi Kepegawaian
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan PangkatASN
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan LanjutanASN
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi KinerjaAparatur
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan EvaluasiKinerja Aparatur
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian danEvaluasi Kinerja Aparatur
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.04	04	Pengelolaan PemberianPenghargaan Bagi Pegawai
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa BagiPegawai
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.04	08	Pengelolaan PenyelesaianPelanggaran Disiplin ASN
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin PerceraianPegawai
5	3	5.03.5.04.0.00.01.00	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN
5	4					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	03	5.03.5.04.0.00.01.00				Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	5.03.5.04.0.00.01.00	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
5	04	5.03.5.04.0.00.01.00	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5	5					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	5.05.0.00.0.00.01.00				Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan PerangkatDaerah
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum PerangkatDaerah
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan RumahTangga
5	5	5.05.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
5	5	5.05.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1						2
5	5	5.05.0.00.0.00.01.00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	5	5.05.0.00.0.00.01.00	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5	5	5.05.0.00.0.00.01.00	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6	1					INSPEKTORAT DAERAH
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00				Inspektorat
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPC
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPC
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPC
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2,06	7	Penyediaan Bahan/Material
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	2,01	3	Reviu Laporan Kinerja
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	2	2,01	4	Reviu Laporan Keuangan
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIF
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawas
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
6	1	6.01.0.00.0.00.01.00	3	2,02		Pendampingan dan Asistensi
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
1					2	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6	01	6.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
7						UNSUR KEWILAYAHAN
7	1					KECAMATAN
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00				Kecamatan Magelang Selatan
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPC
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7	1	7.01.0.00.0.00.01.00	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00				Kecamatan Magelang Tengah
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPC
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KODE					URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
1					2	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	7.01.0.00.0.00.02.00	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00				Kecamatan Magelang Utara
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7	1	7.01.0.00.0.00.03.00	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

KODE						URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
1						2
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8	1					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	8.01.0.00.0.00.01.00				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPC
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPC
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPC
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	1	8.01.0.00.0.00.01.00	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8	1	8.01.0.00.0.00.01.00	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material
8	1	8.01.0.00.0.00.01.00	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06			PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah